

BAB II

BUDAYA POPULER, SEJARAH, DAN SENSITIVITAS IDENTITAS DI KOREA SELATAN

Bab ini menyajikan gambaran umum serta konteks empiris yang menjadi latar belakang munculnya kontroversi drama *Joseon Exorcist* sebagai landasan awal untuk memahami relevansi penelitian. Pembahasan diarahkan pada perkembangan budaya populer Korea Selatan, khususnya peran drama televisi sebagai medium pembentukan makna sosial dan politik di tingkat publik, serta kedudukan drama sejarah dalam pewacanaan identitas nasional.

Signifikansi penelitian ini semakin jelas ketika budaya populer diposisikan sebagai praktik yang selalu terikat dengan kondisi sosial dan geopolitik di sekitarnya, khususnya dalam konteks hubungan antarnegara yang memiliki sejarah panjang serta pertarungan makna yang kompleks. Dengan menelusuri perkembangan budaya populer Korea Selatan, fungsi drama sejarah, dan dinamika relasi Korea Selatan–Tiongkok, dapat dilihat bahwa polemik *Joseon Exorcist* tidak muncul secara kebetulan atau berdiri sendiri. Peristiwa tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari kecenderungan yang lebih luas dalam produksi budaya sekaligus respons publik terhadapnya. Atas dasar itu, penyajian konteks pada bab ini diperlukan untuk mempertegas urgensi penelitian dan menyiapkan landasan konseptual sebelum memasuki analisis yang lebih mendalam mengenai budaya dan praktik *popular geopolitics* pada bab selanjutnya.

2.1. Hallyu dan Perkembangan Budaya Populer Korea Selatan

Hallyu, yang secara global dikenal sebagai *Korean Wave*, merujuk pada fenomena ekspansi transnasional budaya populer Korea Selatan yang berkembang pesat melampaui batas-batas geopolitik negara asalnya (Kim, 2018; KOCIS, 2011). Meskipun saat ini telah berkembang menjadi kekuatan budaya global, genealogi fenomena tersebut berakar pada dinamika regional Asia Timur pada akhir abad ke-20, yaitu periode ketika Korea Selatan mulai melakukan reposisi dari sekadar konsumen budaya menjadi produsen budaya yang berpengaruh di kawasan tersebut (Kim, 2015). Secara historis, kemunculan awal gelombang ini dapat ditelusuri pada periode transisi akhir 1990-an hingga awal 2000-an melalui penggunaan istilah tersebut di media massa Tiongkok. Istilah “Hallyu” (*Hanliu*) pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh surat kabar *Beijing Youth Daily* pada November 1999 untuk menggambarkan meningkatnya ketertarikan pemuda Tiongkok terhadap produk budaya Korea, yang dipicu oleh keberhasilan ekspor drama televisi *What is Love* (1997) serta popularitas grup musik generasi awal seperti H.O.T dan Clon (Yoon & Jin, 2017; KOCIS, 2011). Momen awal ini krusial karena merefleksikan adanya pergeseran struktural dalam lanskap budaya Asia. Pada fase tersebut, Korea Selatan mulai muncul sebagai penantang dominasi budaya populer Jepang dan Barat, sekaligus membentuk kedekatan kultural baru dengan audiens di kawasan Asia (Kim, 2018). Dengan demikian, fase awal perkembangan Hallyu tidak tepat dipandang sekadar sebagai tren sesaat. Periode ini selanjutnya merupakan landasan penting bagi ekspansi media Korea terhadap globalisasi seperti yang ditemukan sekarang.

Ekspansi Hallyu tidak lagi terbatas pada kawasan Asia, melainkan telah meluas secara signifikan hingga memasuki pasar budaya arus utama di Asia Tenggara, Amerika, dan Eropa. Perluasan jangkauan tersebut berlangsung seiring dengan transformasi media distribusi, di mana penyebaran konten budaya Korea beralih dari sistem penyiaran televisi konvensional menuju ekosistem digital yang melampaui batas geografis. Data empiris dari laporan tahunan Korean Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE) serta analisis sosiologis Cicchelli dan Octobre (2021) menunjukkan tren tersebut secara jelas. Laporan *Global Hallyu Trends 2020* mencatat bahwa YouTube mendominasi konsumsi konten video Korea secara global dengan proporsi penggunaan sekitar 80%, sementara Netflix menjadi salah satu platform utama dalam distribusi drama Korea di pasar internasional. Secara lebih spesifik, grup K-pop seperti BTS dan film *Parasite* berhasil memperoleh popularitas luas sekaligus pengakuan kritis di Amerika Serikat dan Prancis, sementara negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Vietnam, memperlihatkan tingkat konsumsi drama Korea yang rutin melalui platform *over-the-top* (OTT) tersebut (KOFICE, 2020; Cicchelli & Octobre, 2021).

Perkembangan ini penting untuk menjelaskan bagaimana budaya populer Korea Selatan menjadi bagian dari konsumsi keseharian masyarakat global. Keberadaan platform digital berperan penting dalam meruntuhkan hambatan distribusi konvensional, sehingga memungkinkan konten Korea menjangkau audiens internasional secara langsung tanpa ketergantungan penuh pada institusi media Barat sebagai *gatekeeper*. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya basis penggemar transnasional yang mengonsumsi budaya Korea bukan lagi sebagai

produk budaya yang bersifat eksotis, melainkan sebagai alternatif budaya populer global yang modern (Yoon & Jin, 2017). Dengan demikian, integrasi antara kualitas produksi budaya seperti K-pop dan film dengan aksesibilitas platform digital berfungsi sebagai katalis utama yang mentransformasi Hallyu dari fenomena regional menjadi kekuatan budaya global yang relatif berkelanjutan. Keberhasilan penetrasi global melalui jalur digital ini selanjutnya membawa implikasi terhadap dinamika diplomasi budaya yang dijalankan Korea Selatan di tingkat internasional.

Perkembangan pesat Hallyu setelah tahun 2000 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses budaya yang berlangsung secara organik, melainkan berkaitan erat dengan restrukturisasi kebijakan pemerintah Korea Selatan yang secara strategis menempatkan industri konten kreatif sebagai pilar baru ekonomi nasional (Dębski et al., 2020). Dalam upaya pemulihan pasca krisis finansial Asia, negara mengambil peran sentral dengan mengalihkan fokus pembangunan dari sektor manufaktur berat menuju penguatan infrastruktur *soft power* yang terlembaga melalui koordinasi birokrasi pusat. Komitmen institusional tersebut terlihat melalui penguatan mandat Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST) dalam mengelola ekosistem budaya secara industri, suatu pendekatan yang oleh Lee (2019) disebut sebagai transformasi negara menuju model *new patron state*.

Korea Creative Content Agency (KOCCA) merupakan salah satu kasus dimana pemerintah secara proaktif menjadi fasilitator *public investment*. KOCCA sebagai sebuah agensi berfungsi untuk memberikan support pada industri budaya

Korea (Trisni et al., 2019). Meskipun intervensi ini dilakukan pemerintah untuk melestarikan budaya, dampak praktikal yang dihasilkan merupakan peningkatan devisa sektoral. Dukungan terhadap budaya memiliki efek positif pada sektor ekonomi pariwisata, ekspor *consumer product*, dan lainnya. Hal ini merupakan turunan dari tenarnya industri televisi dan musik populer yang didukung oleh KOCCA.

Hallyu tidak bisa dikategorikan sebagai komoditas entertainment yang netral. Sekarang ini, fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai suatu agenda strategis pemerintah dalam kepentingan *political-economy*. Korea Selatan secara sadar menyokong agenda industrialisasi budaya secara beriringan dengan industri tradisional. Agenda ini merupakan manifestasi atas rekonstruksi citra nasional dan internasional. Perspektif tersebut ditegaskan oleh sejumlah sarjana, termasuk Kim Bok-rae dan Hye-Kyung Lee, yang menganalisis evolusi kebijakan budaya Korea Selatan dari sudut pandang historis dan politik. Kim (2018) mencatat bahwa Hallyu berfungsi sebagai “gen budaya” (*cultural gene*) dominan yang menimbulkan efek berantai dalam menumbuhkan kebanggaan sipil dan patriotisme masyarakat Korea, yang sebelumnya dibayangi oleh kompleks inferioritas budaya akibat pengalaman kolonial. Sejalan dengan itu, Lee (2019) menyoroti bahwa negara kini berperan sebagai *new patron state* yang secara aktif mentransformasikan budaya menjadi komoditas ekspor, sehingga Hallyu diposisikan sebagai proyek nasional yang dikelola negara untuk menopang kepentingan ekonomi sekaligus diplomasi.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa konsumsi budaya populer tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan merupakan hasil dari perencanaan strategis yang diarahkan untuk memulihkan kepercayaan diri nasional sekaligus menghasilkan keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, Hallyu berfungsi sebagai instrumen *soft power* yang mengubah persepsi global terhadap Korea Selatan, dari negara dengan sejarah kolonial menjadi pusat inovasi budaya yang memiliki daya tarik internasional serta mendukung kepentingan politik luar negeri negara tersebut. Dengan demikian, Hallyu dapat dipahami sebagai mekanisme strategis yang mentransformasikan produk hiburan menjadi instrumen politik identitas yang berperan penting dalam legitimasi nasional Korea Selatan. Oleh karena itu, strategi kebudayaan yang berorientasi pada negara ini memiliki implikasi lebih luas terhadap cara sejarah dan memori kolektif bangsa direpresentasikan dalam produk budaya populer, terutama ketika narasi sejarah nasional diangkat melalui genre drama sejarah.

2.2. Drama Sejarah (*Sageuk*) dan Pembentukan Memori Kolektif

Sageuk, yang secara harfiah berasal dari gabungan kata *sa* (sejarah) dan *geuk* (drama), merupakan genre khas dalam sinema dan televisi Korea Selatan yang berfungsi sebagai representasi visual utama atas masa lalu bangsa tersebut. Meskipun memiliki kemiripan dengan drama periode di Barat dalam upayanya merekonstruksi masa lampau, *sageuk* memiliki distingsi tersendiri melalui fokus naratifnya pada periode-periode penting sejarah Korea, seperti era Tiga Kerajaan, Dinasti Goryeo, dan terutama Dinasti Joseon, yang kerap menjadi latar utama

berbagai produksi populer (Gupta, 2024). Karakteristik genre ini umumnya ditandai oleh latar istana yang megah, penggunaan kostum tradisional hanbok, serta dialog yang kerap mengadopsi gaya bahasa arkais, yang bersama-sama membingkai alur cerita seputar intrik politik istana, perebutan kekuasaan, hingga kehidupan para raja, bangsawan, maupun tokoh militer. Posisi *sageuk* dalam industri televisi Korea tergolong sentral dan mempertahankan popularitasnya sejak era penyiaran televisi hitam-putih, karena genre ini tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memungkinkan penonton membenamkan diri dalam narasi sejarah yang membentuk memori kultural kolektif masyarakat Korea (Korea's Fusion Sageuk, 2012; Yim, 2024). Signifikansi budaya ini menjadi dasar perkembangan *sageuk* modern, ketika batas antara fakta sejarah dan fiksi terus dinegosiasikan ulang agar tetap relevan bagi audiens domestik maupun global.

Drama sejarah Korea (*sageuk*) memiliki posisi strategis dalam dinamika sosial-budaya Korea Selatan karena perannya melampaui sekadar hiburan komersial dan turut berfungsi sebagai sarana konstruksi identitas nasional. Dalam lanskap media kontemporer, genre ini menjadi kanal penting pendidikan sejarah populer yang menjembatani narasi akademis dengan pemahaman publik, sekaligus mentransmisikan nilai-nilai nasionalisme. Hal ini terlihat dari peran *sageuk* sebagai “ruang naratif” tempat memori, identitas, dan ideologi saling berinteraksi, sebagaimana dicontohkan oleh drama *Mr. Sunshine* (2018) yang mendramatisasi resistensi Korea terhadap imperialisme Jepang dan turut membangkitkan sentimen patriotik di kalangan penonton (Caroline F., 2025). Lebih jauh, Kim dan Lee (2017) menyoroti bahwa representasi media dalam drama televisi secara aktif membentuk

memori kolektif masyarakat mengenai peristiwa masa lalu, seperti periode kolonial, dengan membingkai ingatan tersebut dalam orientasi patriotik maupun humanis yang lebih mudah dicerna publik. Meskipun sering memadukan fakta sejarah dan unsur fiksi demi kebutuhan dramatik, drama sejarah tetap memberikan wawasan sosiologis mengenai kehidupan masyarakat pada masa lampau, mulai dari relasi gender hingga nilai-nilai keluarga, yang pada gilirannya mendorong penonton untuk menelusuri kembali fakta sejarah yang sebenarnya (Yang, 2021). Signifikansi fungsi sosial ini menunjukkan bahwa *sageuk* membantu masyarakat memaknai ulang masa lalu bangsanya dengan mengubah sejarah menjadi pengalaman emosional yang relevan bagi audiens masa kini. Dengan demikian, pemahaman atas posisi sosial dan kultural genre ini menjadi penting sebelum memasuki analisis yang lebih spesifik mengenai bagaimana *sageuk* beroperasi dalam konteks hubungan internasional kontemporer.

Drama sejarah Korea tidak hanya hadir sebagai salah satu genre hiburan, tetapi telah berkembang menjadi fenomena budaya populer dengan jangkauan yang luas di dalam dan luar negeri. Dalam perkembangannya, *sageuk* tidak lagi sebatas menggambarkan peristiwa sejarah dan peperangan secara kaku, melainkan semakin menekankan kisah manusia dan emosi tokoh-tokohnya. Artikel editorial HelloKPop menjelaskan bahwa pendekatan ini melahirkan istilah “*fusion sageuk*”, yakni drama sejarah yang memadukan latar masa lalu dengan alur yang lebih emosional dan mudah diterima penonton modern, serta mencatat keberhasilan *Jewel in the Palace* yang terjual ke 91 negara dan menjangkau audiens global (Xiaolong, 2016). Dalam artikel yang sama, *Jumong* disebut sebagai salah satu

contoh keberhasilan terbesar saeguk modern: drama ini mencapai sekitar 51 persen tingkat pemirsa di Korea Selatan dan memperoleh pendapatan signifikan dari penjualan internasional, menjadikannya salah satu drama sejarah dengan capaian rating paling tinggi (Xiaolong, 2016). Sejalan dengan itu, Etoday menegaskan bahwa *Jewel in the Palace* menjadi salah satu motor penting ekspor konten budaya Korea dan turut menguatkan arus Hallyu melalui distribusi ke berbagai kawasan (Kim, 2014). Sementara itu, OhmyNews menyoroti dampak sosial penayangan *Jewel in the Palace* di Tiongkok, dengan laporan mengenai puluhan juta penonton dan perubahan pola tidur masyarakat yang kemudian disebut sebagai “Sindrom Jang Geum” (Cho, 2005). Selain kedua judul tersebut, beberapa drama seperti *Hwang Jini*, *Dong Yi*, *Moon Embracing the Sun*, *Empress Ki*, dan *Six Flying Dragons* juga mendapatkan perhatian luas di dalam dan luar negeri. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa *sageuk* merupakan genre arus utama dengan jangkauan penonton massal dan peran penting dalam budaya populer Korea, sehingga wajar apabila drama sejarah kemudian menjadi wilayah yang sensitif ketika berkaitan dengan Sejarah masa lalu dan memori kolektif bangsa.

Drama sejarah Korea kerap menimbulkan kontroversi ketika dinilai menyimpang dari fakta historis, karena sejarah dipahami oleh masyarakat bukan hanya sebagai narasi masa lalu, melainkan sebagai bagian yang melekat pada identitas kolektif bangsa. Ketika sebuah *sageuk* dianggap secara keliru peristiwa, tokoh, atau simbol sejarah tertentu, respons emosional publik sering kali muncul karena hal tersebut dipersepsikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghormatan kepada leluhur dan pengalaman historis bangsa Korea. Salah satu

studi kasus merupakan *Bon Appetit, Your Majesty*, ketika adegan jamuan kenegaraan dipersoalkan publik; penulis aslinya, Park Guk-jae, kemudian membela diri dengan merujuk langsung pada kitab ritual resmi Dinasti Joseon, *Guk Joo Oreo* sebagai dasar historis (OSEN, 2025). Meskipun demikian, drama tersebut tetap memiliki rating 15%, linear dengan ketenaran diskursus (Tuleconghoa, 2025).

Permasalahan serupa pada *Queen Woo* juga terjadi akibat kemiripan visual dengan tradisi Tiongkok kontemporer. Publik yang reaktif secara cepat membeberkan polemik ini pada social media secara eksponensial (Park, 2024). Kasus *Snowdrop* menunjukkan sensitivitas yang berbeda. Saeguk ini berlatar pada zaman 1980an dengan konteks perjuangan demokratisasi Korea pasca *Gwangju Uprising*. Kekhawatiran bahwa ceritanya dapat mengaburkan makna perjuangan demokrasi memicu petisi daring berskala besar. Stasiun penyiar kemudian merespons melalui klarifikasi resmi (Lim, 2021; Sachdeva, 2021). Pola umumnya jelas: media sosial menjadi arena mobilisasi yang sangat cepat. Kritik penonton dapat berkembang menjadi petisi, boikot, hingga tekanan terhadap sponsor dan penyiar. Saat isu sejarah bersinggungan dengan identitas nasional, drama tidak lagi dipahami sekadar hiburan, tetapi sebagai cerminan cara bangsa Korea memaknai dirinya.

2.3. Identitas Nasional Korea dan Sensitivitas pada budaya populer

Identitas nasional Korea Selatan dibangun atas dasar homogenitas melalui evolusi berkala melalui isolationism pada *peninsula* mereka. Hal ini dipertegas oleh Timothy Lim yang mencatat bahwa bagi mayoritas masyarakat Korea, *Koreanness*

atau “ke-Korea-an” dipahami sebagai identitas yang berbasis pada “darah” (*blood*) dan *minjok* (bangsa/rakyat), bukan semata-mata sebagai status legal atau sosial yang bersifat fleksibel (Lim, 2009). Pandangan tersebut tidak muncul secara alamiah, tetapi dibentuk dan dipelihara secara sistematis melalui institusi pendidikan. Melalui kurikulum nasional, konsep *Dan-il min-jok* bangsa satu etnis ditanamkan sebagai pilar kesadaran nasional untuk menjaga kohesi sosial. Penyatuan unsur ras, budaya, dan sejarah dalam satu definisi identitas ini kemudian melahirkan rasa kepemilikan yang eksklusif terhadap narasi kebangsaan, sehingga identitas kolektif dipandang sakral dan tidak layak untuk dicampuri. Oleh karena itu, kuatnya pondasi etnosentris dalam konstruksi jati diri nasional ini menjadi konteks penting untuk memahami rendahnya ambang toleransi publik Korea terhadap distorsi sejarah atau budaya, baik yang dilakukan oleh aktor eksternal maupun pewacanaan melalui media populer.

Sensitivitas terhadap isu identitas nasional ini tidak terbentuk secara terpisah, melainkan berakar kuat pada pengalaman trauma kolektif yang dialami bangsa Korea sepanjang abad ke-20, ketika keberadaan mereka sebagai suatu bangsa berada pada kondisi yang sangat rentan akibat kolonialisme dan konflik bersenjata. Periode penjajahan Jepang (1910–1945) menjadi momen historis yang menentukan, mengingat karakter pendudukannya yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga diarahkan pada penghapusan identitas budaya Korea melalui penerapan kebijakan asimilasi secara sistematis. Aaron Skabelund menyoroti bahwa kebijakan represif seperti pelarangan penggunaan bahasa Korea di ruang publik, pemaksaan perubahan nama keluarga menjadi nama Jepang (*Sōshi-*

kaimei), serta mobilisasi paksa perempuan Korea sebagai budak seksual (*comfort women*) merupakan bentuk kekerasan kultural yang bertujuan membentuk orang Korea sebagai “subjek Kekaisaran” dengan menghilangkan memori serta ikatan leluhur mereka (Skabelund, 1994). Kondisi traumatis ini kemudian semakin diperparah oleh pecahnya Perang Korea dan pembagian permanen semenanjung, yang menurut Kim Seok dan Kim Jong Gon melahirkan apa yang disebut sebagai “trauma pembagian” (*division trauma*), yakni situasi psikologis yang menanamkan kecemasan akan kelangsungan hidup (*survival anxiety*) serta mentalitas defensif yang mendalam dalam kesadaran nasional Korea (Kim & Kim, 2025).

Eun A Jo menjelaskan pengalaman traumatis dalam sejarah Korea proses ini melalui konsep *binding* atau pengikatan narasi, yaitu praktik negara dalam menetapkan kerangka interpretasi sejarah yang dianggap “legitim” guna mencegah terjadinya perpecahan dalam identitas nasional (Jo, 2022). Proses pelebagaan tersebut dijalankan melalui berbagai *channels of memory* yang saling berkelindan, mencakup perangkat legislasi, kurikulum pendidikan, hingga pengelolaan ruang publik, sebagaimana diterapkan dalam kerangka analitis Shannon Lee yang menekankan peran sinergis instrumen hukum, kultural, sipil, dan politik dalam memelihara narasi sejarah (Lee, 2025). Dalam wujud material, konstruksi memori kolektif ini termanifestasi pada museum dan monumen nasional seperti *Independence Hall of Korea*, yang menurut Jerry Won Lee berfungsi sebagai sarana “sinkronisasi mnemonik” (*mnemonic synchronization*), yakni mekanisme untuk menyelaraskan ingatan warga negara agar berbagi pemahaman yang seragam mengenai penderitaan historis dan kepahlawanan leluhur (Lee, 2014). Guy Podoler

menambahkan bahwa monumen-monumen tersebut beroperasi sebagai “teks sejarah” yang secara berkelanjutan mereproduksi narasi perlawanan anti-kolonial dalam praktik kehidupan sehari-hari (Podoler, 2011).

Perkembangan sensitivitas terhadap sejarah tersebut kini bergeser dan menemukan arena kontestasi baru di ruang digital, di mana warganet tidak lagi berperan sebagai penerima pasif, melainkan menjelma menjadi aktor aktif dalam politik budaya yang secara tegas mengawasi dan mempertahankan narasi kebangsaan. Dinamika ini berkaitan erat dengan karakter sosiologis generasi muda Korea yang oleh Daihyun Kim disebut sebagai “Generasi Isolasi”, yakni kelompok yang memanfaatkan ruang daring sebagai medium utama pembentukan solidaritas afektif serta mengembangkan apa yang ia sebut sebagai *digital mourning culture* sebagai substitusi atas institusi sosial konvensional yang dianggap tidak lagi representatif (Kim, 2025). Praktik aktivisme tersebut tampak nyata dalam reaksi publik yang cepat dan terorganisir terhadap dugaan distorsi sejarah; Shannon Lee mencatat satu kasus penting ketika sebuah program televisi yang dinilai menyimpang dalam merepresentasikan peristiwa Gwangju memicu gelombang respons masif di forum daring, termasuk ribuan komentar yang memobilisasi solidaritas emosional guna menandingi narasi revisionis yang beredar di platform sayap kanan seperti Ilbe. Dalam kerangka ini, petisi daring yang ditujukan kepada Blue House, kampanye boikot, serta aksi kolektif penggemar (*fan action*) tidak dapat direduksi sebagai ekspresi fanatisme budaya populer semata, melainkan harus dipahami sebagai bentuk mekanisme pertahanan kolektif (*collective defense mechanism*) untuk menegaskan dan meluruskan pemaknaan sejarah yang dianggap

terdistorsi (Lee, 2025). Dengan demikian, ruang digital di Korea Selatan berfungsi sebagai benteng bagi “kedaulatan memori”, di mana setiap bentuk kesalahan dalam produk budaya, sekecil apa pun, dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keutuhan identitas nasional.

Misrepresentasi kultural drama televisi tidak dipahami semata sebagai kebebasan artistik-fiksional, melainkan dipersepsikan sebagai ancaman serius terhadap keutuhan memori kolektif yang menjadi fondasi identitas nasional. Kerentanan ini semakin menonjol dalam konteks generasi muda Korea Selatan yang oleh Dong-Yeon Koh diklasifikasikan sebagai “generasi pasca memori” (*postmemory generation*), yaitu kelompok yang tidak memiliki pengalaman langsung terhadap peristiwa sejarah dan karenanya sangat bergantung pada medium budaya, termasuk film dan seni, sebagai sarana utama untuk membangun keterhubungan dengan masa lalu leluhur mereka (Koh, 2022). Dalam situasi ketergantungan tersebut, tuntutan terhadap akurasi pewacanaan media menjadi bersifat fundamental. Distorsi sejarah dalam sebuah drama kemudian tidak dipandang sekadar sebagai produk hiburan yang bermasalah, melainkan sebagai upaya yang berpotensi merusak satu-satunya medium yang memungkinkan generasi ini mengakses dan memaknai akar identitas mereka. Jerry Won Lee menjelaskan bahwa karena konstruksi identitas nasional Korea secara retorik dibentuk melalui oposisi terhadap “*The Other*”, seperti pengalaman kolonialisme, maka narasi fiktif yang mengaburkan perbedaan moral antara korban dan pelaku atau yang melegitimasi sudut pandang revisionis dipahami sebagai tindakan yang melemahkan fondasi ontologis bangsa itu sendiri (Lee, 2014). Lebih lanjut, sejalan

dengan temuan Shannon Lee bahwa “saluran budaya” (*cultural channel*) secara historis berfungsi sebagai medium perlawanan masyarakat dalam mempertahankan kebenaran di tengah represi politik, maka penyimpangan narasi dalam saluran tersebut dipersepsikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap warisan perjuangan kolektif (Lee, 2025). Dengan demikian, tuntutan publik akan “pelurusan sejarah” tidak dapat direduksi sebagai ekspresi fanatisme semata, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme sosiologis yang rasional untuk mencegah kekhawatiran akan terhapusnya identitas nasional melalui manipulasi pewacanaan budaya.

2.4. Relasi Korea Selatan-Tiongkok dalam Dimensi Budaya

Relasi antara Korea dan Tiongkok secara historis berkembang dalam pola hierarki yang relatif stabil di bawah naungan peradaban Konfusianisme melalui mekanisme sistem upeti atau *Sadae*. Menariknya, Robert Kong Chan (2018) menegaskan bahwa bagi Dinasti Joseon, praktik ini bukanlah bentuk subordinasi buta, melainkan strategi diplomasi pragmatis (*yongdae*) demi menjaga kedaulatan domestik sekaligus meraih keuntungan ekonomi. Seiring waktu, para elite Korea menginternalisasi gagasan *so jung hwa* atau "Tiongkok Kecil sebuah kesadaran kolektif yang memosisikan Korea sebagai pewaris sah tradisi Konfusianisme yang lebih murni, terutama saat Tiongkok dipimpin oleh dinasti asing. Legitimasi historis ini kemudian bertransformasi menjadi modal simbolik vital saat normalisasi hubungan diplomatik modern pada 1992, di mana Seong-Hyeon Lee (2022) mencatat bahwa kedekatan geografis dan budaya awalnya dipandang sebagai "aset ekonomi" strategis untuk mengakses pasar Tiongkok yang masif. Namun,

pergeseran dari simbiosis sejarah menuju relasi ekonomi modern ini menyisakan residu psikologis yang signifikan; dalam pusaran nasionalisme kontemporer, kedekatan budaya tersebut kini berisiko berubah dari sumber keuntungan menjadi beban yang memperumit dinamika diplomatik kedua negara.

Keseimbangan relasi bilateral yang sebelumnya bersandar pada legitimasi historis mulai retak di awal abad ke-21. Titik baliknya terjadi pada 2002, saat Tiongkok meluncurkan Northeast Project (Proyek Timur Laut), sebuah program negara yang seketika memicu sengketa historiografi paling sensitif antara Seoul dan Beijing. Peristiwa ini bukan sekadar perdebatan akademik yang berdebu; ia menjadi hantaman keras bagi kesadaran publik Korea Selatan yang merasa sejarah kunonya sedang "direbut" oleh narasi politik tetangganya. Sebagaimana dianalisis oleh Peter Hayes Gries (2005), proyek yang digagas oleh *Chinese Academy of Social Sciences* (CASS) ini secara sistematis merekonstruksi posisi Kerajaan Goguryeo (37 SM–668 M), yang selama ini dipahami sebagai fondasi identitas nasional Korea, dengan mengklasifikasikannya sebagai “rezim etnis minoritas lokal” dalam narasi sejarah Tiongkok; klaim tersebut oleh publik Korea tidak dipandang semata sebagai perdebatan akademik, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi asal-usul bangsa mereka (Gries, 2005). Ketegangan yang pada awalnya muncul dalam konteks historiografi dan buku teks ini kemudian meluas (*spill-over*) ke ranah digital dan bertransformasi menjadi sengketa kepemilikan budaya (*cultural appropriation*), di mana Ziqi Wang (2021) mencatat eskalasi konflik melalui berbagai insiden viral, termasuk polemik seputar YouTuber Li Ziqi yang memicu perdebatan mengenai asal-usul kimchi serta klaim penggunaan elemen busana

bergaya hanbok dalam drama sejarah Tiongkok (Wang, 2021). Dalam perspektif yang dikemukakan oleh Ziqi Wang (2021), rangkaian klaim silang tersebut dimaknai oleh masyarakat Korea bukan sebagai bentuk pertukaran budaya yang wajar, melainkan sebagai manifestasi agresivitas budaya (*cultural imperialism*), di mana Tiongkok dipersepsikan berupaya mengapropriasi simbol-simbol kedaulatan budaya Korea, sehingga menggeser persepsi publik dari melihat Tiongkok sebagai mitra ekonomi menjadi ancaman terhadap integritas identitas nasional.

Akumulasi konflik sejarah dan budaya ini pada akhirnya merombak cara pandang masyarakat Korea Selatan terhadap Tiongkok secara fundamental. Tiongkok tak lagi sekadar mitra strategis, melainkan telah bergeser menjadi sosok *the Other* yang mengancam identitas nasional. Data Esther E. Song (2023) menunjukkan anomali yang dramatis: sentimen anti-Tiongkok, terutama di kalangan anak muda, kini melonjak hingga melampaui sentimen negatif historis terhadap Jepang. Ini bukan sekadar ketegangan diplomatik sesaat; Yu Jeong Hwang (2025) melihatnya sebagai "ancaman simbolik" di mana narasi budaya Tiongkok dianggap sebagai upaya hegemonik untuk mengikis kekhasan Korea. Istilah populer seperti "pencuri budaya" (*culture thieves*) yang ramai di jagat maya mencerminkan kecemasan kolektif bahwa warisan mereka sedang dirampas. Bahkan hal sepele seperti Kimchi pun bisa memicu *food nationalism* (Hong Sik Cho, 2006). Di sini, makanan bukan lagi soal urusan dapur, melainkan kedaulatan simbolik dan martabat nasional. Pada titik inilah resistensi budaya menjadi elemen inti yang mempertegas batas jati diri Korea Selatan modern di tengah kepungan pengaruh eksternal.

Peningkatan konflik budaya ternyata mengalami percepatan yang cukup drastis di ranah digital. Internet dan media sosial tidak lagi sekadar menjadi jalur pertukaran lintas batas; mereka justru berkembang menjadi arena yang memperkuat fragmentasi dan polarisasi identitas. Thomas Chase (2011) menamakan fenomena ini sebagai *cyber-nationalism*. Di sini, perdebatan sejarah yang sebelumnya terbatas pada diskursus akademis yang kaku berubah menjadi konsumsi massa yang lebih cair, emosional, dan seringkali ahistoris, terutama di forum-forum daring. Sehubungan dengan hal tersebut, Shin Haeng Lee (2025) menyoroti adanya mekanisme yang disebut “proteksionisme digital”. Algoritma media sosial menciptakan semacam ruang gema (*echo chambers*) yang secara sistematis memvalidasi bias pengguna. Akibatnya, identitas lokal yang eksklusif semakin diperkuat, sementara peluang untuk memahami perspektif lintas budaya nyaris tertutup. Patut dicatat bahwa fenomena ini tidak berdiri sendiri. Media arus utama, menurut penelitian Angie Y. Chung dkk. (2021), kerap membingkai berita sehingga Tiongkok ditampilkan sebagai ancaman atau bahkan “musuh bersama”, dengan tujuan memperkuat kohesi domestik saat krisis. Dari kombinasi kedua faktor ini, terbentuklah ekosistem digital yang sangat reaktif. Isu budaya yang sebenarnya minor pun dapat dengan cepat diperbesar menjadi apa yang disebut “kepanikan moral” (*moral panic*) berskala nasional. Dalam konteks Korea Selatan, dinamika ini menjadi landasan struktural bagi ledakan sentimen publik yang besar, contohnya tampak jelas pada pembatalan drama *Joseon Exorcist*, yang menjadi titik fokus analisis dalam penelitian ini. Perlu diakui, fenomena ini menunjukkan bagaimana

ruang digital bisa memodifikasi intensitas konflik budaya dengan cara yang tidaklah sederhana dan kerap tak terduga.

2.5. Kontroversi *Joseon Exorcist*: Gambaran Umum Kasus

Drama televisi *Joseon Exorcist* atau dalam Bahasa Korea 조선구마사 merupakan salah satu produk budaya populer yang diproduksi oleh stasiun penyiaran SBS dan mulai ditayangkan pada Maret 2021 dengan mengusung format *sageuk* berbalut fantasi. Serial ini membangun alur cerita dengan memadukan unsur fiksi supranatural ke dalam latar historis Dinasti Joseon, dengan fokus utama pada upaya Raja Taejong beserta keluarga kerajaan dalam menghadapi ancaman roh-roh jahat yang digambarkan bangkit untuk merusak stabilitas negara. Keberadaan plot yang memadukan entitas sejarah faktual dengan elemen eksorsisme ini menjadi data penting untuk dipahami karena menunjukkan bagaimana industri kreatif Korea Selatan berupaya mengeksplorasi kembali sejarah nasionalnya melalui lensa fantasi yang modern (CNN Indonesia, 2021). Pendekatan genre yang melibatkan figur-figur sentral dalam sejarah Korea tersebut menempatkan *Joseon Exorcist* pada posisi yang sekaligus inovatif dan problematis, mengingat narasi yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga bersentuhan langsung dengan ingatan kolektif masyarakat terhadap sejarah dan leluhur mereka. Ketegangan antara kebebasan artistik dan sensitivitas historis inilah yang kemudian menjadi titik awal terbentuknya dinamika penerimaan publik yang berkembang menjadi perdebatan luas sejak penayangan episode perdananya.

Eskalasi perhatian publik terhadap drama ini terutama dipicu oleh aspek visual dan alur naratif tertentu yang dipersepsikan sebagai penyimpangan dari sejarah, khususnya melalui kehadiran elemen budaya Tiongkok yang dinilai tidak sesuai dengan konteks periodisasi. Usai penayangan dua episode awal, perbincangan publik dengan cepat terfokus pada ketidaksinkronan antara latar Dinasti Joseon dan properti yang ditampilkan dalam adegan. Hal ini terbukti melalui kemunculan adegan yang menampilkan makanan khas Tiongkok, seperti kue bulan dan pidan (telur pitan), serta minuman keras bergaya Tiongkok di meja makan, di samping penggunaan kostum dan pedang yang juga dinilai lebih condong pada estetika Tiongkok daripada Korea (Lee & Kim, 2021). Selain persoalan properti, pewacanaan tokoh sejarah turut menjadi sumber keberatan yang signifikan; Raja Taejong digambarkan melakukan pembantaian terhadap penduduk desa yang tidak bersalah akibat halusinasi, sebuah insiden yang tidak memiliki dasar faktual dalam catatan sejarah, serta Pangeran Chungnyeong yang diposisikan sebagai pihak subordinat di hadapan seorang penerjemah asal Tiongkok (Dong, 2021; Woo, 2021a). Publik tidak lagi melihat rangkaian tersebut sebagai bentuk kebebasan kreatif. Bagi mereka, ini adalah penyimpangan serius terhadap sejarah dan identitas nasional yang sudah jadi harga mati. Kejanggalan visual hingga karakterisasi yang melenceng akhirnya menumpuk, menciptakan keresahan kolektif yang nyata di kalangan penonton. Menariknya, keresahan inilah yang kemudian mengkristal dan memicu reaksi sosial yang masif. Pada titik ini, kita bisa melihat betapa sensitifnya publik saat sejarah dan simbol budaya mereka dirasa sedang dipertaruhkan.

Protes publik terhadap *Joseon Exorcist* tak hanya pada perdebatan normal di media sosial. Dengan cepat, kritik itu berkembang menjadi aksi penolakan yang lebih terstruktur, melibatkan aktor institusional sekaligus partisipasi publik berskala besar. Hal ini menegaskan bahwa sentimen negatif penonton tidak sekadar diekspresikan secara simbolik; lebih jauh, ia dialihkan menjadi tuntutan konkret melalui mekanisme formal negara maupun organisasi masyarakat. Bukti konkret tampak pada langkah tegas Asosiasi Keluarga Kerajaan Jeonju Lee, yang menaungi keturunan keluarga kerajaan Joseon. Organisasi ini secara terbuka mengancam distorsi karakter leluhur mereka dan menuntut penghentian tayangan. Tidak hanya itu, muncul pula petisi daring ke Blue House yang berhasil mengumpulkan lebih dari 216.000 tanda tangan, mendesak pembatalan drama tersebut (Jo, 2021; Song, 2021; President Go.Kr, 2021).



Gambar 2. 1 Tangkapan Layar Petisi Penghentian Penayangan Joseon Exorcist di Situs Blue House

Sumber: Wayback Machine

Di tingkat pengawasan penyiaran, intensitas penolakan publik juga tercermin dari meningkatnya intervensi regulator. Di ranah regulasi penyiaran, keseriusan resistensi publik juga tercermin dari masuknya lebih dari 3.900 aduan resmi kepada Korea Communications Standards Commission (KCSC) dalam waktu

singkat (Korea JoongAng Daily, 2021). Skala mobilisasi yang melibatkan jumlah partisipan yang besar serta keterlibatan aktor penjaga warisan sejarah ini menegaskan bahwa kontroversi yang muncul telah melampaui persoalan preferensi artistik, dan menyentuh ranah sensitif identitas nasional. Tekanan publik yang muncul secara simultan dan berlapis-lapis pada akhirnya menggoyahkan stabilitas proses produksi drama. Para pemangku kepentingan pun terdorong untuk meninjau kembali kelanjutan proyek, di tengah potensi implikasi kebijakan sekaligus risiko reputasional yang semakin menguat. Perlu diakui, dinamika ini menunjukkan bagaimana sentimen kolektif masyarakat mampu memengaruhi keputusan strategis industri kreatif secara signifikan, bukan sekadar opini sementara yang mudah hilang.

Tekanan publik yang masif nyatanya sanggup meruntuhkan sokongan komersial dan institusional drama ini dalam sekejap. Meski pihak stasiun TV dan rumah produksi sempat mencoba meredam gejala lewat permohonan maaf resmi pada 24 Maret 2021, pasar ternyata tidak memberi ruang bagi kompromi (Kim, 2021; Yoon, 2021). Efek domino pun tak terelakkan: raksasa korporasi seperti Samsung Electronics dan LG Household & Health Care langsung memutus kontrak, disusul penarikan dukungan administratif oleh pemerintah daerah (Reuters, 2021; Joo, 2021). Tanpa napas finansial dan legitimasi formal, posisi drama ini menjadi mustahil dipertahankan. Puncaknya, hanya dua hari setelah krisis pecah, SBS mengambil langkah drastis menghentikan permanen penayangan *Joseon Exorcist* meski baru berjalan dua episode (Kim, 2021; Woo, 2021b). Kejatuhan kilat ini

menjadi bukti nyata bahwa dalam industri kreatif Korea, sentimen kultural publik kini memiliki taji yang jauh lebih kuat dibanding kepentingan ekonomi semata.

Secara garis besar, rangkaian peristiwa yang dimulai dari penayangan awal, berkembangnya penolakan publik, hingga keputusan penghentian permanen *Joseon Exorcist* memperlihatkan dinamika konflik yang khas antara tuntutan akurasi sejarah dan kebebasan artistik dalam ranah media transnasional. Kasus ini menegaskan bahwa produk budaya populer tidaklah berada dalam ruang netral; sebaliknya, mereka berfungsi sebagai arena kontestasi di mana memori kolektif dan sentimen identitas nasional dipertahankan, diinterpretasikan, dan dimaknai secara politis. Perlu diakui, fenomena ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara budaya, politik, dan ekonomi, yang tidak mudah direduksi menjadi argumen tunggal. Kuatnya respons audiens yang menolak unsur hibriditas budaya asing yang dipersepsikan mengancam menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan industri hiburan, melainkan perlu dibaca sebagai ekspresi kecemasan terhadap keamanan identitas. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi titik masuk penting untuk menjelaskan bagaimana budaya populer dapat memicu bentuk resistensi geopolitik yang nyata. Pembahasan tersebut akan dikembangkan secara lebih mendalam pada bab selanjutnya dengan menggunakan perspektif *popular geopolitics* dan konsep *self-other* guna mengurai mekanisme pembentukan batas imajiner antara identitas “kita” (Korea) dan “mereka” (Tiongkok) yang bekerja secara dominan dalam respons publik terhadap drama ini.